

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemunculan tantangan pada perkembangan globalisasi saat ini, mengarah kepada isu pembangunan yang diprioritaskan pada integrasi berwawasan lingkungan (Febriana, et al., 2019). Tantangan berupa ketidaksetaraan dalam pembangunan lingkungan dan sumber daya manusia sering menjadi isu utama yang tak dapat diabaikan. Adanya ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya menjadi faktor utama terjadinya ketidaksetaraan tersebut (Yolanda & Hasanah, 2024).

Isu ketidaksetaraan yang dipicu oleh ketimpangan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya (Yolanda & Hasanah, 2024), berpotensi diperparah oleh krisis lingkungan dan perubahan iklim. Dampak negatif dari degradasi lingkungan seringkali dialami secara tidak proporsional oleh kelompok masyarakat rentan, yang pada akhirnya memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi (social-environmental inequality) (Schlosberg, 2004).

Environment, Social, Goverment (ESG) merupakan pendekatan atau konsep yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola sebelum pengambilan keputusan. Konsep ini bukan hanya sekedar tren, melainkan juga menjadi suatu keharusan yang mendesak guna mewujudkan keberlanjutan ekonomi di tingkat global (Tarumingkeng,

2024: 5). Saat ini, ESG tidak hanya diterapkan dalam praktik operasional perusahaan skala besar saja, tetapi telah merambah pada sektor usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Namun pada pelaku UMKM, belum seluruhnya menerapkan prinsip ESG karena masih jauh dari jangkauan dan secara nyata dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar UMKM di berbagai wilayah (Noer, et al., 2024).

Hasil temuan di lapangan memperlihatkan adanya jurang yang lebar antara wacana ESG di tingkat nasional dengan kondisi nyata UMKM di Indonesia. Ketika perusahaan besar mulai berkonsentrasi pada isu dekarbonisasi, *net zero emission*, dan penyusunan laporan keberlanjutan, pelaku usaha mikro masih bergulat dengan masalah mendasar seperti keterbatasan modal, stagnasi inovasi produk, keterampilan pemasaran digital yang rendah, hingga kendala akses internet. Bahkan di sejumlah wilayah, jaringan telekomunikasi belum memadai sehingga transformasi digital sulit diwujudkan, artinya program pembinaan UMKM yang diluncurkan oleh pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan nyata UMKM. Pelatihan kewirausahaan juga sering kali tidak berlanjut karena keterbatasan anggaran, sementara penerapan standar ESG seperti penggunaan bahan ramah lingkungan atau sertifikasi keberlanjutan, masih dirasakan terlalu mahal dan memberatkan usaha kecil. Padahal banyak UMKM sebenarnya sudah mengimplementasikan praktik berkelanjutan meski tidak menggunakan istilah ESG, seperti pengrajin lokal di Subang yang berhasil mengolah limbah tempurung kelapa menjadi produk

kerajinan bernilai ekonomi. Hal ini menunjukkan semangat ekonomi UMKM, meskipun tidak pernah tercatat dalam laporan keberlanjutan ESG (Link UMKM, 2025).

Selain pengrajin limbah tempurung di Subang tersebut, ternyata di Kota Surabaya juga terdapat UMKM yang berupaya menerapkan prinsip ESG dalam operasionalnya, yaitu UKM Batik Wistara yang mempekerjakan karyawan disabilitas sebagai bagian dari aspek *social* (S) dalam kerangka ESG karena berhubungan langsung dengan isu kesetaraan, inklusi, dan hak asasi manusia. Langkah ini mencerminkan komitmen UKM Batik Wistara dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial, praktik yang dilakukan oleh UKM Batik Wistara dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor, konsumen, dan masyarakat, karena menunjukkan kepedulian terhadap kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan di dunia kerja, yang disebabkan adanya kesulitan masyarakat untuk menerima perbedaan secara objektif, khususnya dalam hal penilaian terhadap keberagaman. Kondisi ini membuat pekerja dengan disabilitas kerap menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, mulai dari ketidakadilan upah, keterbatasan fasilitas akomodasi, hambatan dalam memperoleh promosi jabatan, hingga tidak adanya akses terhadap asuransi (Riana, et al., 2024).

Langkah UKM Batik Wistara dalam mempekerjakan penyandang disabilitas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 14 yang menegaskan kewajiban setiap perusahaan, baik milik negara maupun swasta, untuk membuka kesempatan kerja yang setara bagi penyandang cacat. Perusahaan diharuskan mempekerjakan disabilitas sesuai dengan kualifikasi, tingkat disabilitas, pendidikan, dan kemampuan yang dimiliki.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kontribusi UMKM bagi penyandang disabilitas juga telah dilakukan oleh (Sitepu, et al 2024), dimana UMKM yang memberdayakan kaum disabilitas menghasilkan banyak perubahan positif karena kaum ini mengalami peningkatan motivasi akan kesetaraan hak dan peningkatkan kepercayaan diri. Oleh sebab itu, berlandaskan beberapa penelitian terdahulu, maka akan dikembangkan penelitian baru pada UKM Batik Wistara untuk mengetahui penerapan ESG terutama pada aspek-aspek lainnya, selain aspek *social* yang mempekerjakan penyandang disabilitas, dengan urgensi sebagai evaluasi untuk memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan dan memperbaiki tata kelola internal agar lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan standar keberlanjutan dalam ESG.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena yang terjadi pada UKM Batik Wistara yang mempekerjakan karyawan disabilitas mengetahui sejauh mana penerapan

ESG, membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Environment, Social, Goverment* (ESG) pada UKM Batik Wistara?
2. Apa tantangan dan peluang UKM Batik Wistara dalam mempekerjakan karyawan disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian tentang UKM Batik Wistara yang mempekerjakan karyawan disabilitas dan mengetahui sejauh mana penerapan ESG, diantaranya:

1. Untuk mengetahui penerapan *Environment, Social, Goverment* (ESG) pada UKM Batik Wistara.
2. Untuk menganalisa tantangan dan peluang UKM Batik Wistara dalam mempekerjakan karyawan disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian memberikan gambaran nyata mengenai praktik penerapan ESG di UKM yang mempekerjakan karyawan disabilitas, sehingga Pemerintah Daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun program pemberdayaan UMKM, penyediaan

incentif, serta regulasi yang mendukung inklusi sosial, lingkungan, dan tata kelola yang baik.

1.4.2 Manfaat Bagi Batik Wistara

Bagi Batik Wistara, penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana penerapan ESG sudah dilakukan, serta tantangan dan peluang yang muncul dalam praktik bisnis inklusif. Hasil analisis dapat digunakan sebagai evaluasi untuk memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan, meningkatkan citra positif di mata konsumen dan mitra bisnis, serta memperbaiki tata kelola internal agar lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan standar keberlanjutan.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan panduan bagi pelaku usaha lain, khususnya UKM, mengenai bagaimana mengintegrasikan aspek ESG dalam kegiatan bisnis sekaligus menciptakan lapangan kerja yang ramah disabilitas. Hasil penelitian juga digunakan sebagai contoh pada praktik baik yang dapat direplikasi di sektor lain, sehingga mendorong lebih banyak UKM untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan dan inklusi.

1.4.4 Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga memberikan literasi tentang penerapan ESG dalam UKM, terutama yang memiliki fokus pada inklusi disabilitas. Penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman tentang hubungan Resource-Based View (RBV) dengan praktik ESG dalam skala bisnis kecil, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen strategis dan keberlanjutan di ranah akademik